

Literasi Kaum Muda tentang *Good Governance* Melalui Isu Korupsi di Televisi

Johanes Edo NK, Raymundus Rikang RW, Cornel Dimas SK

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281
Email: edokarensa@gmail.com

Abstract: *Politics, for young people, is mostly uninteresting. But the large amount of television news coverage on corruption cases could be used to study the literacy of youth about good governance. This research is using mix-method and examining 89 respondents and 12 informants in Kelurahan Panembahan and Gowongan Yogyakarta which are differentiated by socio-economic characteristics. Cross-tabulation and coding model are used for analysis. According to young people the government has bad performance due to various corruption cases that affect the governance embodiment. The uses of numerous medium to obtain information could help the youth to have high literacy about good governance.*

Key words: *young people, media literacy, politics, good governance*

Abstrak: *Bagi kaum muda umumnya, politik adalah membosankan, namun maraknya pemberitaan kasus korupsi di televisi perlu digunakan untuk menjajagi literasi kaum muda tentang good governance. Penelitian ini menggunakan mix-method terhadap 89 responden dan 12 informan di Kelurahan Panembahan dan Gowongan Yogyakarta yang terbedakan oleh latar sosio-ekonomi. Analisis menggunakan tabulasi silang dan tiga model coding: open, axial, selective. Hasil penelitian menunjukkan umumnya kaum muda menilai buruk kinerja pemerintah karena berbagai kasus korupsi, yang diyakini mempengaruhi perwujudan tata kelola pemerintahan. Penggunaan berbagai media untuk memperoleh informasi memperlihatkan bahwa tingkat literasi kaum muda dalam pemahaman tentang good governance sudah cenderung tinggi.*

Kata kunci: *kaum muda, literasi media, politik, good governance pemahaman tentang good governance sudah cenderung tinggi.*

Dalam era informasi, televisi tidak lagi dipandang sebagai suatu benda dalam wujud layar kaca. Televisi bahkan ikut mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui informasi yang disajikannya. Sampai saat ini, stasiun televisi swasta nasional yang menghiasi layar kaca penonton Indonesia yakni, RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTV, TV One, Metro TV, Trans TV, dan Trans7 (<http://www.asiawaves.net/indonesia-tv.html>). Implikasi dari banyaknya stasiun televisi swasta

nasional di Indonesia adalah persaingan antar media demi mendapatkan pangsa pasar. Persaingan tersebut umumnya melalui program acara dengan *genre* dan konten tertentu yang disodorkan kepada khalayak. Setidaknya masing-masing stasiun televisi memiliki program acara tersendiri yang berfokus pada *news* sebagai kontennya. RCTI mengandalkan “Seputar Indonesia” sebagai program *news*, kemudian SCTV dengan program “Liputan 6”, dan Trans TV dengan program acara

“Reportase”. Hanya ada dua stasiun televisi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada *news*, yakni Metro TV dan TV One.

Kondisi ini menandakan bahwa program acara *news* penting bagi kebutuhan informasi masyarakat. Melalui program acara *news* pula, pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun lembaga-lembaganya menjadi fokus pembahasan oleh media. *'Pers sebagai pilar keempat memainkan peranan penting bagi kendaraan informasi dan komentar kritis terhadap tindakan negara. Dari pada mendelegasikan pengambilan keputusan untuk parlemen, pers memungkinkan masyarakat untuk menjadi 'komentator kritis permanen' pada isu-isu politik'* (Buckingham, 2000:22). Fungsi dan peranan pers di atas, wajib dijalankan di negeri demokrasi seperti di Indonesia. Sebab media bukan hanya sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, melainkan jembatan bagi penyaluran aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Danang Widiyoko, Koordinator *Indonesian Corruption Watch*, yakni *"Masyarakat semakin cerdas juga karena kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers di negeri ini"* (<http://www.antaranews.com>. Jumat 3 Desember 2010). Pernyataan Danang ini bukannya tanpa alasan, sebab kasus korupsi yang melibatkan elite politik di Indonesia sangat sulit terungkap. Justru media massa berada di garda terdepan sebagai penggerak anti korupsi. *“Media massa semakin berperan membangkitkan solidaritas masyarakat untuk menghadapi kasus korupsi ... tekanan anti-korupsi menjadi lebih efektif karena media*

massa berperan memberikan informasi untuk menggalang solidaritas, kemudian menyatukan kepentingan masyarakat". Isu-isu korupsi menjadi suatu rutinitas yang muncul dalam program acara *news* di televisi yang memungkinkan masyarakat menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Isu korupsi sendiri merupakan salah satu indikator yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan wakil rakyat merosot. Hal ini dikuatkan oleh hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan kajian kualitatif mengenai penyebab merosotnya kepuasan publik. *“Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga menduduki posisi teratas penyebab merosotnya kepuasan publik. Menurut peneliti LSI, Ajie Alfaraby, menurunnya kepercayaan tersebut karena saat kampanye, Presiden SBY menyerukan akan memerangi korupsi”* (<http://www.tempo.co>, 18 September 2011). Tidak sampai di sini saja, pemberitaan kasus korupsi juga turut memberi dampak bagi masa depan politik Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Goethe-Institut* dan *The Friedrich Naumann Foundation for Freedom*, yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan *Merdeka Center for Opinion Research Malaysia*, menunjukkan bahwa minat kaum muda terhadap politik sangat kecil. *“Dalam survei yang melibatkan 1.496 kaum muda dari*

semua provinsi di Indonesia, secara keseluruhan tampak terlihat kaum muda tidak begitu tertarik dengan politik. Hanya 28,6% mengatakan bahwa mereka tertarik dengan politik, sementara 16,1% memilih berpartisipasi dalam pemilu. Bahkan 48% dari responden memandang politik adalah membosankan” (<http://metrotvnews.com>, 14 Juni 2011).

Secara tidak langsung fenomena di atas merupakan petaka bagi kehidupan masa depan politik Indonesia, yang sejatinya menempatkan kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Apatisnya sikap kaum muda terhadap politik bukannya tanpa sebab. Menurut Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, *“Pemberitaan buruk di media massa tentang kasus korupsi dan skandal elite atau parpol secara langsung mempengaruhi pandangan kaum muda terhadap politik itu sendiri”*. Dominannya media dalam mengangkat isu korupsi tak bisa dipungkiri telah mempengaruhi minat kaum muda terhadap politik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi khusus untuk mengetahui lebih dalam pemahaman kaum muda tentang isu korupsi di televisi. Beberapa peneliti media telah menyodorkan suatu gagasan yang bermanfaat untuk mengetahui keterampilan individu dalam menggunakan media, atau yang akrab disebut sebagai literasi media. Menurut pandangan Rick Shepherd: *“literasi media adalah pemahaman, informasi kritis terhadap media massa. Ini melibatkan teknik, teknologi, dan lembaga yang terlibat dalam produksi media; yang mampu secara kritis menganalisis pesan media; dan mengakui*

penonton berperan dalam membuat makna dari pesan tersebut” (<http://www.media-awareness.ca>).

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui literasi kaum muda tentang *good governance* melalui isu korupsi di televisi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literasi media sebagai sarana untuk melihat pemahaman kaum muda tentang *good governance* melalui isu korupsi di televisi. Dalam literasi media, keterampilan individu menggunakan media menjadi ukuran yang penting untuk melihat bagaimana individu memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa. Sedangkan untuk subyek penelitian, peneliti melakukannya pada kaum muda. Anies Baswedan pernah mengungkapkan, *“Saat ini generasi muda kita banyak yang berfikir apatis dan pesimistis, karena media sebagai sumber informasi yang mudah diserap masyarakat turut mengubah cara pandang dengan berita-berita yang berlebihan”* (<http://www.metrotvnews.com>, 5 Agustus 2010). Pernyataan Anies Baswedan tersebut, seolah menegaskan bahwa kaum muda belum memiliki kemampuan literasi media yang cukup untuk membekali dirinya, sehingga kaum muda hanya *taken for granted* terhadap pesan-pesan media. Sikap kaum muda yang apatis dan pesimis, akan berakibat fatal bagi kehidupan politik bangsa. Terlebih bila dikaitkan dengan pesta demokrasi tahun 2014 mendatang, yang menempatkan kaum muda sebagai penentu lahirnya pemimpin baru negeri ini. *“Kelompok apatis atau apolitis biasanya teralienasi dari sistem atau proses politik yang ada. Karena itu,*

kelompok pemuda ini mudah terseret ke dalam arus golput karena pemilu dianggap tidak terkait dengan kepentingan pragmatis mereka” (<http://politik.vivanews.com>, 13 Maret 2010).

Terkait dengan isu korupsi yang diteliti, maka perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi pada umumnya dipandang sebagai penyimpangan terhadap standard perilaku tertentu. Umumnya yang dianggap sebagai ukuran adalah norma-norma hukum. Mas'oe'd (1994:167) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri. Tindakan korupsi ini meliputi transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (seperti uang atau gratifikasi lainnya) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.

Konsep *good governance* merupakan sebuah model baru yang muncul dalam rangka pembangunan berkelanjutan dalam suatu sistem negara. Transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, proyeksi tentang situasi masa depan, dan aturan hukum yang terwujud dalam suatu negara menjadi tanda terwujudnya *good governance*. Kondisi ini bisa menciptakan solidaritas sosial, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menegawantahkan konsep *good governance* tersebut (Ahmadi dan Homauni, 2011:115).

Berdasarkan definisi World Bank tentang *good governance*, ada 6 kriteria spesifik yang dibutuhkan demi terwujudnya *good*

governance, yaitu 1). Iklim demokratis dan akuntabilitas; 2) Stabilitas politik, tanpa kekerasan; 3) Pemerintahan yang efektif; 4) *Regulatory burden*; 5) Peraturan hukum; dan 6) Pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pandangan ini, maka bisa dilihat bahwa konsep *good governance* akan terwujud jika keenam kategori di atas terimplementasikan dalam kerangka berikut ini:

1. Hak bersuara serta akuntabilitas yang di dalamnya termasuk kebebasan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan stabilitas politik.
2. Pemerintahan yang efektif yang mencakup kualitas pembuatan kebijakan dan layanan publik.
3. Tata hukum yang mencakup perlindungan akan hak milik, independensi hukum serta mampu mengontrol praktek korupsi yang terjadi.

Selain itu, tim peneliti menggunakan beberapa isu korupsi di televisi melalui penjabaran kriteria *good governance* yang meliputi:

1. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.
2. Transparansi. Azas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di pemerintahan.

3. **Fleksibilitas.** Penyesuaian diri secara mudah dan cepat dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Dalam konteks tata pemerintahan yang baik (*good governance*), fleksibilitas bisa didefinisikan sebagai langkah tanggap, cepat, dan tepat pemerintah dalam mengatasi berbagai perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik baik lokal, nasional, maupun internasional.
4. **Proyeksi tentang situasi masa depan.** Perkiraan tentang masa yang akan datang dengan menggunakan pijakan data atau situasi yang sekarang sedang dialami.
5. **Aturan hukum yang terwujud.** Produk hukum yang ada dalam suatu negara dan produk hukum itu secara efektif terlaksana dan terbukti implementasinya.
6. **Ketanggapan.** Suatu reaksi tanggapan untuk memberikan jawaban terhadap suatu stimulus terhadap pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam suatu kerangka waktu tertentu. Pemerintahan yang baik menunjukkan kepekaan terhadap permintaan, ekspektasi, dan kebutuhan setiap individu dan kelompok.
7. **Berorientasi pada konsensus.** *Good governance* mensyaratkan adanya kemungkinan untuk terciptanya suatu kesepakatan dan kesepakatan antara berbagai kepentingan yang beragam dalam masyarakat, namun tetap mencakup kepentingan semua pihak.

Kemudian peneliti juga melihat literasi kaum muda berdasarkan prakondisi

terwujudnya *good governance* dalam suatu negara, yaitu:

1. **Iklm demokratis.** Suatu sistem tata negara yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan juga dalam praksisnya mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Praktek yang paling riil adalah penyelenggaraan pemilu kepala negara/daerah secara langsung oleh rakyat.
2. **Stabilitas politik tanpa kekerasan.** Suatu situasi mantap dan seimbang dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terwujud karena salah satunya menekankan terjadinya diskriminasi yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. **Pemerintahan yang efektif.** Kinerja aparat pemerintah yang membawa manfaat bagi masyarakat atau mewujudkan hasil guna yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
4. **Hukuman bagi pelanggar aturan.** Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas bagi tiap-tiap warga negara tanpa terkecuali yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara.
5. **Peraturan hukum.** Tatanan (yang berisi petunjuk, kaidah, atau ketentuan) yang secara sengaja dibuat oleh manusia untuk menciptakan keselarasan dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks politik, peraturan hukum ini kerap didefinisikan sebagai prinsip yang

menyatakan keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menjalankan kekuasaannya.

6. Pemberantasan korupsi. Serangkaian tindakan untuk mencegah tindakan korupsi (melalui koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di ruang sidang pengadilan) dengan dibantu oleh peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Karakteristik dan pra kondisi mengenai *good governance* ini akan dijadikan landasan untuk melihat literasi kaum muda di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Gowongan. Peneliti melakukan literasi isu melalui beberapa isu pemberitaan yang ada di media televisi. Beberapa permasalahan yang menjadi sarana bagi peneliti untuk melihat literasi isu adalah 1). Kasus Bank Century dan keterlibatan Partai Demokrat; 2) Gayus Tambunan dan mafia pajak; 3) Kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Miranda Gultom dan PDIP, dan 4) Wisma Atlet dan Angelina Sondakh.

Relasi antara korupsi dan konsep terwujudnya *good governance* sangat erat kaitannya. Berdasarkan pada definisi dan konsep *good governance*, bisa dikatakan bahwa praktek korupsi digolongkan sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Korupsi mampu mereduksi prinsip tidak adanya diskriminasi dalam upaya menikmati semua fasilitas dan keuntungan serta menghancurkan partisipasi yang dibentuk dalam rangka mengatur masyarakat sekaligus mampu menciptakan jurang yang lebar dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas.

Prinsipnya, korupsi dan konsep *good governance* adalah suatu hal yang kontras satu dengan yang lainnya. Ini artinya *good governance* mampu untuk mereduksi praktek korupsi lewat peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik akan korupsi serta penguatan aturan hukum yang tegas untuk melawan praktek korupsi. Hal sebaliknya juga terjadi, bahwa praktek korupsi mampu menghalangi terwujudnya sistem *good governance* serta menciptakan deviasi dalam pengambilan serta implementasi kebijakan.

Literasi Media dan Urgensinya

Media massa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup keseharian manusia. Media bahkan telah mengisi sebagian besar ruang kehidupan manusia dan mayoritas peran itu dimainkan oleh media yang tampil secara visual. Senada dengan identifikasi Jesse S. Gainer (2010:364) tentang peran besar media, khususnya media audio visual:

“We live in a multimedia age where the majority of information people receive comes less often print sources and more typically from highly constructed visual images, complex sound arrangements, and multiple media formats”

Perkembangan teknologi dan media disertai dengan implikasi yang dibawa menuntut masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali dan membaca pesan yang disampaikan oleh media massa, khususnya televisi. Jika media semakin bebas dalam mengintervensi kehidupan manusia, terutama

proyeksi mereka terhadap realitas sosial yang dihadapi, maka dampak yang timbul yakni penguatan akan realitas media dalam kehidupan sehari-hari semakin nyata.

Potter (2008:11) menjelaskan bahwa ada dua karakteristik yang bisa ditandai sebagai wujud dari praktek literasi media. Pertama, khalayak mampu mengkritik media dan menyadari bahwa keseharian mereka telah dipengaruhi media. Kedua, bahwa literasi media mendorong orang untuk berpikir sepanjang prakteknya mengakses media sehingga mampu berargumentasi terhadap pesan-pesan media yang destruktif. Kedua karakteristik dari literasi media di atas bertujuan untuk memperingatkan khalayak untuk selalu berpikir dan mengambil sikap oposisional terhadap praktek industri media sekaligus pesan media yang disampaikan. Dalam bukunya *Media and Literacy: Learning in Information Age-Issues, Ideas, and Teaching Strategies*, Adams dan Hamm (2000:29) menulis, “*Helping children become critical consumers of electronically-produced information is major social responsibility*”. Gagasan tersebut membuktikan bahwa isu mengenai literasi media dengan sasaran anak-anak dan kaum muda menjadi urgensi dalam era multimedia seperti sekarang ini.

Lebih jauh lagi, Edward T. Arke dalam disertasinya yang berjudul *Media Literacy and Critical Thinking: Is There Connection?*, menjelaskan bahwa dampak dari era multimedia membuat kampanye gerakan literasi media menjadi semakin menguat. Hal ini dilandasi oleh alasan bahwa literasi media berusaha untuk mendukung individu dengan satu set

kemampuan analitis yang memungkinkan mereka lebih kritis dalam praktek konsumsi media dan dalam beberapa kasus mampu mengimplementasikan perubahan sikap yang signifikan (Arke, 2005:20).

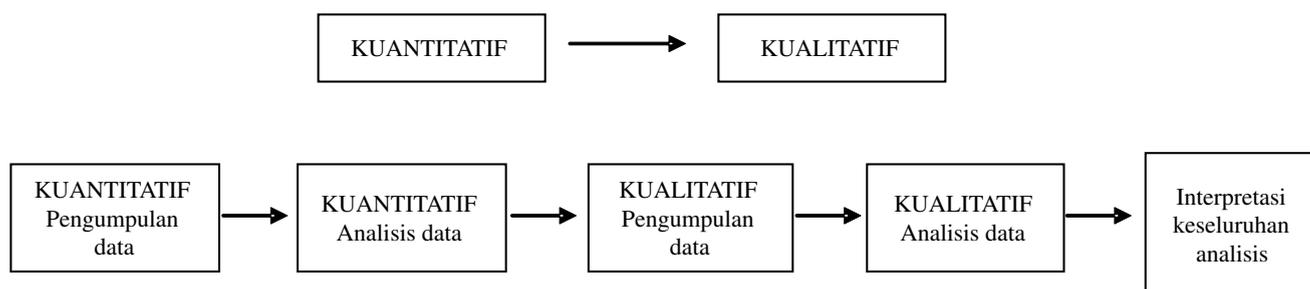
Wadsworth dan Thompson menulis dalam jurnal *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research* dengan judul *Media Literacy: A Critical Role for Dietetic Practice* bahwa literasi media menjadi solusi yang jitu dalam era media seperti sekarang ini. Gagasan dalam literasi media membuat khalayak mampu melawan mitos dalam pesan media melalui pemikiran kritis. Program dalam literasi media memampukan khalayak memiliki pilihan yang positif, karena bekal pemikiran kritis dan ketrampilan membaca pesan media, serta memahami dampak sosial dan nilai yang lebih luas dari pesan media (Wadsworth dan Thompson, 2005:31).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris kuantitatif-kualitatif. Metode campuran yang digunakan oleh peneliti adalah strategi eksplanatoris sekuensial. Strategi ini diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif (Creswell, 2010:316).

Strategi penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed method*). Peneliti memilih metode campuran berdasarkan

Gambar 1. Diagram Strategi Penelitian



pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan penelitian komparasi dua wilayah, yang membutuhkan dua tahap yakni pemetaan masalah dan pendalaman masalah. Pada tahap pemetaan, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk melihat tingkat literasi kaum muda di masing-masing wilayah. Sedangkan pada tahap pendalaman masalah, peneliti menggunakan metode kualitatif *in depth interview* pada informan yang mewakili tiap tingkatan literasi, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai literasi kaum muda tentang *good governance* melalui isu korupsi di televisi. Data kuantitatif kemudian saling dihubungkan dan dikombinasikan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif.

Penelitian ini fokus melihat literasi kaum muda mengenai konsep *good governance* di televisi. Adapun kaum muda yang dimaksud berasal dari dua lokasi yang berbeda, yaitu kawasan Code dan kawasan Kraton. Konsep literasi kaum muda didapatkan dari pemahaman kaum muda mengenai isu politik yang ditampilkan di televisi. Untuk mengukur literasi kaum muda tersebut, peneliti menggunakan dua tahapan pengumpulan data, yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka peneliti memilih kaum muda yang lahir antara November 1992 sampai dengan tahun 1997 sebagai subjek penelitian. Dengan asumsi, bahwa mereka merupakan golongan pemilih pemula pada saat pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2014 yang akan datang. Penelitian dilakukan pada dua kawasan di kota Yogyakarta, yakni kawasan Code, Kelurahan Gowongan dan kawasan Kraton, Kelurahan Panembahan. Peneliti memilih wilayah kota Yogyakarta, karena pada tanggal 25 September 2011 yang lalu, Kota Yogyakarta melangsungkan pemilihan umum kepala daerah, sehingga, kaum muda yang berstatus pemilih pemula, mendapatkan pengalaman memilihnya pada pilukada. Zahrin Afina, Koordinator Aksi Komunitas Pelajar Duta KPU mengungkapkan, “*masih banyak pelajar kota Yogya yang memiliki hak pilih, tetapi tak peduli dengan pemilu. Karena itu kami mengajak agar mereka mulai mengawali dengan cara ikut pada Pilukada*” (<http://www.tribunnews.com>, 7 September 2011).

Peneliti memilih lokasi penelitian di kawasan Code, Kelurahan Gowongan dan kawasan Kraton, Kelurahan Panembahan,

dengan maksud untuk membandingkan literasi kaum muda tentang *good governance* melalui isu korupsi di televisi pada kedua wilayah tersebut. Meskipun secara administratif, kedua kawasan tersebut merupakan bagian dari Kotamadya Yogyakarta, namun sangat mungkin berbeda dalam dinamika kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini berdasarkan pada letak geografis masing-masing kawasan. Kawasan Code, Kelurahan Gowongan letaknya di bantaran Kali Code, yang mana penduduknya secara sosial ekonomi masuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Tipologi masyarakat yang secara ekonomi tidak cukup kuat tersebut kadang memunculkan istilah bahwa daerah Code merupakan “daerah hitam” yang mana banyak aksi kriminalitas dan ketimpangan masyarakat ada di daerah tersebut. Sedangkan kawasan Panembahan merupakan salah satu basis wisata di kota Yogyakarta, sehingga sebagian besar penduduknya fokus pada penguatan sektor ekonomi dari bisnis wisata. Latar belakang lain adalah daerah Panembahan merupakan daerah yang menjadi basis konstituen salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah kaum muda yang berusia 14-19 tahun di kawasan Code, Kelurahan Gowongan dan kawasan Kraton, Kelurahan Panembahan. Jumlah populasi yang ada di dua lokus penelitian tersebut adalah 89 orang yang terdiri dari strata pendidikan SMP dan SMA. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *total sampling*.

Informan ditentukan dari masing-masing tingkat literasi. Peneliti memilah sampel

menjadi tiga tingkat literasi yaitu tinggi, sedang dan rendah. Peneliti juga memilah berdasarkan lokus dan tingkat pendidikan. Peneliti akan mengambil 12 responden untuk pengumpulan data dengan *in-depth interview*.

Analisis data kuantitatif diperoleh dari metode survei dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner berisi dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pertanyaan seputar praktek konsumsi media, sedangkan bagian kedua berisi pertanyaan tentang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan responden mengenai isu korupsi di televisi, yang diturunkan dalam operasionalisasi konsep *good governance*, yakni akuntabilitas, fleksibilitas, aturan hukum yang terwujud, iklim demokrasi, dan sebagainya.

Analisis data kualitatif dilakukan berdasar hasil transkrip wawancara *in-depth interview* yang dikelompokkan bersama dengan data lainnya (foto-foto, rekaman, dan lain-lain). Pengelompokan dilakukan berdasarkan kategori yang ada. Data-data akan dimasukkan dalam *coding sheet* yang terdiri atas tiga tahapan (Creswell, 2010:275): *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

HASIL PENELITIAN

Penjajakan terhadap sejauh mana responden memiliki relasi dengan media massa ditunjukkan melalui data preferensi isu yang diminati dalam tayangan berita di televisi dan rujukan alternatif yang dimiliki oleh responden dalam memahami isu di media massa seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Topik Berita Favorit

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Prestasi Pemerintah	12	11	25,84
Korupsi	4	11	16,85
Politik LN	4	0	4,50
Kriminalitas	13	10	25,84
Lainnya	10	14	26,97
Jumlah	43	46	100,00

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Gowongan memiliki preferensi isu yang relatif seimbang satu dengan yang lainnya. Isu mengenai prestasi kerja pemerintah diminati sebanyak 23 responden (25,84%) dengan rincian 12 orang di Panembahan dan 11 orang di Kelurahan Gowongan. Isu korupsi dipilih oleh 15 responden dengan distribusi 4 orang di Kelurahan Panembahan dan 11 orang di Kelurahan Gowongan. Topik politik luar negeri menjadi pilihan isu yang paling sedikit digemari dengan prosentase 4,50% (4 responden di Kelurahan Panembahan).

Tabel 2 menunjukkan referensi alternatif pemahaman responden terhadap isu. Meskipun 100% responden dalam kuesioner menjawab

Tabel 2. Referensi Alternatif Pemahaman Isu

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Koran	12	17	32,58
Radio	2	1	3,38
Internet	22	17	43,82
Peer Group	6	11	19,10
Lainnya	1	0	1,12
Jumlah	43	46	100,00

mengakses televisi, mereka juga menggunakan media lain sebagai pelengkap aktivitas bermediana. Perbedaan jumlah yang signifikan pada Kelurahan Gowongan, *peer groups* menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan sejauh mana responden paham mengenai isu korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dibandingkan dengan Kelurahan Panembahan yang hanya 6 responden yang menyatakan bahwa *peer groups* berpengaruh besar menjadi alternatif rujukan selain televisi. Sedangkan radio hanya dipilih oleh 3 responden (3,38%) sebagai pendamping sumber informasi selain televisi.

Selanjutnya, tabel 3 menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah yang ditampilkan di televisi yang dianggap sebagai kondisi yang riil terjadi.

Tabel 3. Kerja Pemerintah di TV sebagai Kondisi Riil

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Ya	22	15	41,57
Ragu-ragu	18	23	46,07
Tidak	3	8	12,36
Jumlah	43	46	100,00

Sebanyak 46,07% responden (18 di Kelurahan Panembahan dan 23 di Kelurahan Gowongan) menyatakan ragu-ragu bahwa televisi bisa diandalkan untuk menilai kinerja

Tabel 4. Penilaian Prestasi Kerja Pemerintah setelah Menonton TV

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Baik	10	8	20,23
Biasa saja	13	18	34,83
Buruk	20	20	44,94
Jumlah	43	46	100,00

pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa televisi ternyata secara potensial mampu mengkonstruksi pemikiran masyarakat dan membentuk persepsi bahwa, yang dimuat dalam

tayangan berita, mencerminkan secara keseluruhan kerja pemerintah, yang mana 37 responden menyatakan demikian (41,57%). Hanya 12,36% responden masih yakin bahwa berita di televisi bukanlah kondisi riil dari kerja pemerintah dewasa ini.

Tabel 4 menunjukkan sebanyak 10 responden di Kelurahan Panembahan dan 8 responden di Kelurahan Gowongan menilai bahwa berbagai tayangan berita mengenai pemerintah di televisi membuat prestasi pemerintah sejauh ini masih

Tabel 5. Berita Korupsi di TV sebagai Kondisi Riil Pemerintah

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Ya	25	23	53,93
Ragu-ragu	10	18	31,46
Tidak	8	5	14,61
Jumlah	43	46	100,00

Tabel 5 menunjukkan hasil dari persepsi kaum muda di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Gowongan mengenai berbagai pemberitaan isu korupsi di televisi. Sebagian besar responden (53,93%) percaya bahwa korupsi yang diberitakan di televisi merupakan kondisi riil yang dilakukan pejabat publik, yang mana 25 orang di Kelurahan Panembahan dan 23 orang di Kelurahan Gowongan mempercayai hal tersebut. Sedangkan 28 responden (10 orang di Kelurahan Panembahan dan 18 orang di Kelurahan Gowongan) masih ragu untuk mengatakan bahwa korupsi di televisi adalah cerminan kerja nyata pemerintahannya. Hanya 14,61% responden yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap pemberitaan korupsi di televisi sebagai citra kerja pemerintah Indonesia.

baik (20,23%). Sedangkan penilaian kinerja pemerintah biasa saja sebanyak 34,83% dengan distribusi di Panembahan 13 orang dan 18 orang di Kelurahan Gowongan. Penilaian bahwa kinerja Kelurahan Gowongan. Penilaian bahwa kinerja pemerintah dikategorikan buruk setelah menyaksikan program berita televisi sebanyak 40 responden mengatakannya atau setara dengan 44,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, kaum muda di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Gowongan menilai tidak ada yang istimewa dari kerja pemerintah.

Tabel 6. Ada Korelasi antara Korupsi dengan Good Governance

	Panembahan (f)	Gowongan (f)	%
Ya	33	23	67,42
Ragu-ragu	4	10	15,73
Tidak	6	9	16,85
Jumlah	43	46	100,00

Korupsi yang menjadi salah satu elemen dalam konsep *good governance* dinilai memiliki relasi dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Tabel 6 menunjukkan sebanyak 60 responden (67,42%) yakin bahwa korupsi berpengaruh dan memiliki hubungan dengan *good governance*. Sisanya (15,73%) ragu-ragu untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara tindakan korupsi dengan upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. Lantas 15 responden (16,85%) menyatakan bahwa korupsi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan *good governance*. Data tersebut mengindikasikan bahwa responden sebagian besar mengerti bahwa korupsi merupakan salah satu hal yang harus dihilangkan demi mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Tabel 7. Kategori Literasi Kaum Muda Tingkat SMP

Kelas	Kategori	Panembahan		Gowongan	
		f	%	f	%
38-55	Literasi rendah	4	17,39	6	30
56-73	Literasi sedang	8	34,78	9	45
74-92	Literasi tinggi	11	47,83	5	25
Jumlah		23	100,00	20	100

Berdasarkan hasil pengolahan data, seperti ditunjukkan pada tabel 7 dari 89 kuesioner di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Gowongan diperoleh data bahwa skor terendah tingkat SMP di kedua daerah tersebut adalah 38 dan tertinggi adalah 92. Di Kelurahan Gowongan setelah dibagi dalam tiga tingkat literasi (rendah, sedang, dan tinggi) ditemukan hasil bahwa 6 orang (30%) memiliki literasi yang rendah, literasi sedang berjumlah 9 orang (45%), dan literasi tinggi berjumlah 5 orang (25%). Sedangkan hasil yang diperoleh di Kelurahan Panembahan masih di tingkat SMP menunjukkan hasil bahwa responden yang memiliki literasi *good governance* yang rendah sebanyak 4 orang (17,39%), literasi sedang berjumlah 8 orang (34,78%), dan literasi tinggi berjumlah (47,83%).

Strata pendidikan SMA di kedua daerah tersebut menunjukkan bahwa 23,08% responden (6 orang) di Kelurahan Gowongan memiliki pemahaman yang rendah mengenai *good governance* dibandingkan dengan Kelurahan Panembahan yang hanya memiliki satu responden (5%) berliterasi rendah. Sembilan responden di Kelurahan Gowongan (34,61%) dan delapan orang (40%) di Kelurahan Panembahan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua daerah tersebut mengenai pemahaman *good*

Tabel 8. Kategori Literasi Kaum Muda Tingkat SMA

Kelas	Kategori	Panembahan		Gowong	
		f	%	f	%
46-60	Literasi rendah	1	5	6	23,08
61-75	Literasi sedang	8	40	9	34,61
76-90	Literasi tinggi	11	55	11	42,31
Jumlah		20	100	26	100,00

governance. Sedangkan pada tingkat literasi tinggi Kelurahan Gowongan memiliki 11 orang (42,31%) dan di Kelurahan Panembahan memiliki 11 orang (55%).

PEMBAHASAN

Keberhasilan perwujudan konsep *good governance* di Indonesia sebenarnya bergantung pada media massa dan pemberantasan korupsi. Tesis ini dirumuskan dari temuan data baik pada instrumen kuesioner maupun *in-depth interview* yang dilakukan pada informan. Pertama, media memiliki peran yang sangat besar dalam hal sosialisasi isu-isu penting pemerintahan yang secara tidak langsung merupakan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Keseluruhan responden (100%) menyatakan bahwa dalam kesehariannya mereka setidaknya mengakses televisi. Artinya televisi secara intrinsik sudah menjadi bagian keseharian kaum muda di Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Panembahan.

Sebagaimana Buckingham (2000:12) mengatakan bahwa riset pada ranah literasi isu politik (*good governance*) yang berkaitan dengan media harus diletakkan pada ranah '*political socialization*'. Hal ini berkaitan dengan proses perkembangan kognisi,

sikap, dan perilaku kaum muda terhadap lingkungan politisnya. Artinya media berperan untuk mengkonstruksi apa yang diistilahkan Buckingham sebagai '*political knowledge*' yang merujuk pada pengetahuan faktual kaum muda mengenai dinamika politik bangsanya. Hal ini dibuktikan dengan rujukan isu korupsi yang digunakan contoh oleh informan untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang elemen-elemen dalam *good governance*.

Larasati Dwi, informan dengan literasi tinggi tingkat SMA di Kelurahan Panembahan mengatakan bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR sudah lupa dengan kewajibannya menjadi wakil rakyat yaitu membantu kesulitan rakyat dan mengentaskan kemiskinan rakyat sehingga kinerja mereka dianggap tidak bertanggungjawab. Alih-alih menyejahterakan rakyat dari belenggu kemiskinan, praktek korupsi menjadi hal yang jamak ditemui di televisi tentang pemberitaan DPR RI.

Berita menjadi rujukan yang cukup signifikan jumlahnya, di mana sebanyak 42,69% kaum muda di Kelurahan Panembahan (16 orang) dan Kelurahan Gowongan (22 orang) meminati topik berita isu prestasi kerja pemerintah dan berita korupsi. Pembahasan ini ingin menyajikan fakta bahwa media adalah kanal sosialisasi paling berpengaruh bagi kaum muda dewasa ini yang mana di Indonesia dominasi isu populer adalah mengenai korupsi sehingga tidak mengherankan bahwa informan (Larasati Dwi, Rara Dita, Dina Yuliana, Sista Putri, Christian Atwinanto) mengatakan bahwa pemerintah belum secara maksimal bekerja karena masih banyak pejabat publik yang korupsi.

Aktivitas informan menonton televisi jelas berpengaruh pada bagaimana informan mengkonstruksi dunia nyata lewat televisi. Apa yang disajikan di televisi dipercaya sebagai keadaan riil. Kasus korupsi yang muncul di media televisi secara terus-menerus tentu berdampak pada bagaimana informan memandang pemerintah secara keseluruhan. Informan menjadi cenderung apatis mengenai konsep *good governance* yang disajikan oleh peneliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil riset yang peneliti peroleh, maka pengajuan gagasan untuk merebut hati calon konstituen baru ini bisa ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Pendidikan literasi dan anti-korupsi pada kurikulum sekolah

Urgensi untuk memberdayakan kaum muda pada berbagai isu strategis harus segera mendapat perhatian serius. Korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, harus bisa direduksi dengan penanaman sikap dan pengetahuan anti korupsi pada kurikulum sekolah sejak dini. Di samping itu, penguatan literasi media harus juga masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia sejak dini bersama dengan pendidikan anti korupsi. Pengaruh media yang kuat dewasa ini harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk berpikir kritis dalam memilah pesan-pesan media dan secara strategis menyerapnya sebagai pengetahuan positif.

2. Pemberantasan Korupsi dan Penguatan KPK:

Kunci *Good Governance*

Pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga independen anti korupsi seperti KPK menjadi hal penting yang mana perspektif pelibatan partisipasi masyarakat lokal bisa dipandang sebagai upaya untuk reformasi pemerintahan demi mewujudkan tata kelola yang baik. Penyederhanaan prosedur administratif, survei korupsi di perkotaan besar, komputersasi data dan sistem elektronik, akses terhadap informasi perundang-undangan, mekanisme komplain yang jelas, lingkaran studi yang progresif, dan penguatan lembaga independen anti korupsi di Indonesia bisa menjadi jalan keluar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arke, Edward T. 2005. *Media Literacy and Critical Thinking: Is There A Connection?* Michigan: Duquesne University.
- Adams, D. dan Hamm, M. 2000. *Media and literacy: Learning in an electronic age-Issues, Ideas and Teaching Strategies*. Springfield.
- Ahmadi, Freyedon dan Golamhosain Homauni. 2011. "The Role of Good Governance in Fighting Against Corruption and Financial Crimes", dalam *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 3 No.1.

- Buckingham, David. 2000. *The making of citizens: young people, news, and politics*. London: Routledge.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gainer, Jesse S. 2010. "Critical Media Literacy in Middle School: Exploring the Politics of Representation", dalam *Journal of Adolescent and Adult Literacy*.
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Potter, James. 2008. *Media Literacy*. London: SAGE Publications.
- Wadsworth, Laurie A. dan Angela M. Thompson. 2005. "Media Literacy: A Critical Role for Dietetic Practice", dalam *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*.

Sumber Internet:

- <http://politik.vivanews.com/news/read/136167-2014> diakses 5 September 2011.
- <http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/08/05/25301/> diakses 28 September 2011
- <http://metrotvnews.com/read/news/2011/06/14/54674/Kaum-Muda-Muslim-tidak-Minati-Politik> diakses 14 Juni 2011
- <http://www.tribunnews.com/2011/09/07/pelajar-di-yogya-jangan-golput-ayo-ikut-pemilukada> diakses 7 September 2011
- <http://www.tempo.co/read/news/2011/09/18/078356860/Inilah-5-Penyebab-Merosotnya-Kepuasan-Publik-Terhadap-SBY> diakses pada 18 September 2011
- <http://www.asiawaves.net/indonesia-tv.html> diakses pada 5 Oktober 2011
- <http://www.antaranews.com>. Jumat 3 Desember 2010 diakses pada 20 September 2011
- <http://www.media-awareness.ca> diakses pada 19 September 2011